

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan menjamin keadilan dalam berusaha. Peranan pemerintah untuk menciptakan efisiensi ekonomi dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Pertama fungsi alokasi, yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien atau fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Kedua, fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat, Ketiga, fungsi stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Oleh karena itu, adanya peranan pemerintah dapat mengurangi kegagalan pasar.

Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Tidak ada satu perekonomian pun yang bebas dari intervensi pemerintah, yang ada adalah perbedaan kadar intervensi pemerintahnya. Jika intervensi pemerintah relatif besar untuk menstabilkan kondisi ekonomi, maka negara tersebut menganut sistem ekonomi sosialis. Jika intervensi pemerintah relatif kecil (dibatasi) untuk menstabilkan kondisi ekonomi, maka negara tersebut menganut sistem ekonomi kapitalis (Parulian, 2010). Bentuk intervensi atau campur tangan pemerintah

dalam perekonomian terkait dengan peran alokasi, di mana pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang publik. Hal ini terjadi karena mekanisme pasar tidak akan berminat menyediakannya (Harjanto, 2014). Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Pada terjadinya kegagalan pasar, maka pemerintah diharapkan untuk ikut campur tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien. Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Hal ini disebabkan karena sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian, sehingga tidak mungkin perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Konsekuensi dari peran alokasi pemerintah adalah ketersediaan anggaran yang pada akhirnya berwujud pada belanja pemerintah. Salah satu negara yang memerlukan intervensi pemerintah dalam upaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan intervensi terkait dengan belanja pemerintah yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam mengelola perekonomian negara Indonesia dari sisi fiskal.

Sukirno berpendapat bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN dan APBD (Sukirno, dalam

Galih, 2012). Keynes berpendapat bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan terutama apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas (Keynes, dalam Galih, 2012). Guritno menyatakan bahwa belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Galih, 2012).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Adolph Wagner. Hasil pengamatan empiris Adolph Wagner menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (*law of ever increasing state activity*) (Wagner, dalam Parulian 2010). Perkembangan belanja pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap *Gross National Product* (GNP). Lebih jelasnya, bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif belanja pemerintah pun akan meningkat.

Tabel 1.1
Tabel Belanja Pemerintah
Periode Tahun 1990-2010

Tahun	Belanja Pemerintah (Miliar Rupiah)	Tahun	Belanja Pemerintah (Miliar Rupiah)	Tahun	Belanja Pemerintah (Miliar Rupiah)
1990	38165	1997	98513	2004	435700
1991	47450	1998	131545	2005	509419
1992	50492	1999	231900	2006	669880
1993	58166	2000	221000	2007	752373
1994	64460	2001	354500	2008	985790
1995	72343	2002	327900	2009	937397
1996	82353	2003	377200	2010	1042133

Sumber: Worldbank (diolah)

Tabel 1.1 menggambarkan kondisi belanja pemerintah periode tahun 1990-2010. Menurut laporan perekonomian Indonesia, pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang memporak porandakan perekonomian global. Krisis moneter ini dimulai dari adanya gejala atau kejutan (*shock*) keuangan dan menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap dolar Amerika Serikat merupakan pencetus atau trigger poinnya. Dampak krisis mulai dirasakan Indonesia. Perekonomian Indonesia mulai mengalami penurunan yang ditandai dengan makin melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis keuangan global juga menyebabkan tingkat inflasi meningkat drastis serta belanja pemerintah mengalami penurunan. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara ketiga variabel makroekonomi yang diproksikan dalam pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar mengalami perubahan, yaitu ketika tingkat inflasi terlalu tinggi dapat memperburuk keadaan ekonomi, dan mengakibatkan nilai riil belanja pemerintah mengalami penurunan.

Makroekonomi membahas mengenai variabel-variabel yang berhubungan dengan gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan. Menurut Silvia dkk (2013), salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dalam pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Tabel 1.2 menyajikan fenomena fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 1990-2010.

Tabel 1.2
Tabel Tingkat Inflasi Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Periode Tahun 1990-2010

Tahun	Inflasi (%)	Tahun	Inflasi (%)	Tahun	Inflasi (%)
1990	9.93	1997	11.1	2004	6.4
1991	9.93	1998	77.63	2005	17.11
1992	5.05	1999	2.01	2006	6.6
1993	10.14	2000	9.35	2007	6.59
1994	8.57	2001	12.55	2008	11.06
1995	8.86	2002	10.03	2009	2.78
1996	5.17	2003	5.06	2010	7

Sumber: World Bank (diolah)

Pada tahun 1990-1996 tingkat inflasi cenderung dapat dikendalikan pada level satu digit. Sayangnya, krisis moneter pada pertengahan 1997 membuat laju inflasi kembali melejit sampai dengan tahun 1998 (Sadikin, 2010). Terjadinya keterpurukan inflasi di tahun 1998 tersebut memberikan dampak yang cukup besar yaitu dengan munculnya berbagai tragedi sosial, politik, dan ekonomi di seluruh penjuru tanah air. Bank Indonesia mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk meredam kondisi tersebut yang berdampak penurunan laju inflasi pada tahun berikutnya. Sepuluh tahun terakhir ini tingkat inflasi cukup fluktuatif.

Menurut laporan perekonomian Indonesia, inflasi tahun 2005 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi tersebut tercermin pada perkembangan inflasi bulanan pada 2005 yang secara

rata-rata lebih tinggi bila dibandingkan inflasi bulanan pada 2004. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya harga-harga yang diatur pemerintah. Tingkat inflasi kembali mulai fluktuatif pada tahun berikutnya yaitu tahun 2006-2010, masing-masing sebesar 6,6%, 6,59%, 11,06%, 2,78%, dan 7%.

Baasir menyatakan bahwa inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. Perkembangan yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik (Baasir, dalam Nugroho dan Maruto, 2012). Teori Keynes menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomi mereka. Artinya permintaan total masyarakat terhadap barang-barang melebihi kemampuan memproduksi masyarakat akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. *Inflationary gap* merupakan inflasi permintaan yang ditimbulkan oleh belanja pemerintah, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial.

Inflasi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun APBN pada awal tahun maupun juga menjadi APBN Perubahan serta penentuan besaran anggaran baik dari sisi pengeluaran. Kenaikan inflasi akibat dari kenaikan *aggregat demand* membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan menaikkan pajak untuk mengurangi *disposable income* atau menekan belanja pemerintah sehingga mendorong turunnya *aggregat demand* yang dapat mendorong turunnya inflasi. Oleh karena itu, inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja pemerintah. Tabel 1.3 menyajikan data nilai tukar di Indonesia pada periode tahun 1990-2010.

Tabel 1.3
Tabel Nilai Tukar Rupiah
Periode Tahun 1990-2010

Tahun	Kurs (Rp/US)	Tahun	Kurs (Rp/US)	Tahun	Kurs (Rp/US)
1990	1901	1997	4650	2004	9290
1991	1992	1998	8025	2005	9830
1992	2062	1999	7085	2006	9020
1993	2110	2000	9595	2007	9419
1994	2200	2001	10400	2008	10950
1995	2308	2002	8940	2009	9400
1996	2383	2003	8465	2010	8991

Sumber: World Bank (diolah)

Pada tahun 1998 nilai dolar menembus angka Rp 8025/dollar hal tersebut merupakan efek krisis moneter pada tahun tersebut dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1997 nilai dollar hanya berada pada posisi Rp 4650/dollar. Namun pada tahun 1999 nilai Rupiah mengalami penguatan terhadap nilai dollar yaitu Rp 7085/dollar. Pada tahun 2000 dan tahun 2001 Nilai kurs dollar mengalami penguatan terhadap nilai Rupiah yaitu sebesar Rp 10400/dollar dan 8940/dollar, hal tersebut tidak lepas dari kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga mendorong pelemahan pada perekonomian dalam negeri dan mengakibatkan terpuruknya sebagian besar industri. Dari tahun 2002 sampai pada tahun 2008 nilai dollar mengalami pergerakan yang tidak terlalu signifikan yaitu pada level Rp 8940/dollar pada tahun 2002, Rp 8465/dollar pada tahun 2003, Rp 9290/dollar pada tahun 2004 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 9830/dollar pada tahun 2005 akibat kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dan pada Tahun 2008 yang menembus angka Rp 10850/dollar akibat dari krisis keuangan dunia. Selanjutnya pada tahun 2009 nilai

rupiah kembali mengalami penguatan terhadap dollar yaitu Rp 9400/dollar dan tahun 2010 Rp 8991/dollar.

Tabel 1.4
Tabel Pendapatan Perkapita Indonesia
Periode Tahun 1990-2010

Tahun	Pendapatan perkapita (Rp)	Tahun	Pendapatan perkapita (Rp)	Tahun	Pendapatan perkapita (Rp)
1990	1103476	1997	3197022	2004	10735075
1991	1264861	1998	4797326	2005	12779233
1992	1428888	1999	5439972	2006	15152144
1993	1630808	2000	6900842	2007	17660705
1994	2033948	2001	8052654	2008	21803204
1995	2383586	2002	8778314	2009	24349980
1996	2752423	2003	9554806	2010	13112733

Sumber: World Bank(diolah)

Menurut laporan perekonomian Indonesia, menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2004 menunjukkan perkembangan yang semakin mantap, bahkan lebih baik dari perkiraan awal tahun. Pertumbuhan ekonomi meningkat, disertai pola ekspansi yang makin seimbang. Tahun 2005 merupakan tahun yang dinamis dan penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia, terutama setelah triwulan I-2005. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 cenderung melambat seiring dengan semakin kuatnya tekanan pada kestabilan makroekonomi meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2004.

Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan suatu kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka belanja pemerintah merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut

(Mangkoesebroto, dalam Ardiyanto 2013). Pengaruh kenaikan belanja pemerintah dapat digambarkan dalam model yang dibangun oleh Keynes yang menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat (Mankiw, dalam Ardiyanto 2013).

Hubungan antara belanja pemerintah dan pendapatan perkapita telah menjadi suatu analisis yang penting dan sangat menarik bahkan sejak zaman ahli ekonomi terdahulu. Wagner menyatakan sebuah teori mengenai perkembangan belanja pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner juga menyatakan adanya kemungkinan bahwa perkembangan belanja pemerintah mungkin berbeda-beda antara level pemerintah pusat dan level pemerintah daerah. Teori yang dikemukakan oleh Wagner ini dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*".

Terdapat tiga alasan yang mendasari penelitian mengenai belanja pemerintah. Pertama, belanja pemerintah merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya belanja pemerintah bagi suatu perekonomian karena digunakan sebagai instrument kebijakan fiskal. Kedua, penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar intervensi pemerintah dalam suatu perekonomian. Semakin besar belanja pemerintah dalam suatu perekonomian, maka semakin besar intervensi pemerintahnya. Ketiga, untuk

mengetahui pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap belanja pemerintah yang diprosikan dengan pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh terhadap belanja pemerintah Indonesia?
2. Apakah pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara parsial berpengaruh terhadap belanja pemerintah Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara simultan terhadap belanja pemerintah Indonesia.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan nilai tukar secara parsial terhadap belanja pemerintah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan studi untuk dapat lebih memahami dan mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah serta variabel bebas apa yang pengaruhnya paling signifikan terhadap belanja pemerintah.

Manfaat lainnya yaitu memberikan kajian teoritis mengenai pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah, menambah studi empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemerintah, serta sebagai referensi dan masukan bagi penelitian yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan yang dapat mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian, studi literatur dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian, kerangka pikir, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan pendekatan dari suatu penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis, sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain, gambaran umum dari objek penelitian, hasil pengujian, dan pembahasan. Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian serta pembahasan mengenai pengaruh antar variabel.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang sehubungan dengan permasalahan penelitian secara menyeluruh, serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak lain maupun bagi penelitian selanjutnya.